



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA



20
27

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan : Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811- 5506 – 900

Website : dpmtsp.kukarkab.go.id

Email : dpmtsp@mail.kukarkab.go.id

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :P-120/DPMPTSP/SET.3/900.1.1.2/01/2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dirumuskan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan di internal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 serta Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027;
 - d. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - f. bertanggungjawab dan memberi keputusan terhadap substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
2. Sekretaris, bertugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. mengkoordinir secara penyelenggaraan Forum operasional Perangkat dan Daerah teknis untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027;

- c. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, dan sebagainya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - d. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
 - f. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - g. mengkoordinir terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - h. mengkoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
3. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. menelaah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

- d. mengkoordinir penyiapan bahan serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027; dan
 - e. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
4. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut:
- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026; dan
 - d. menyiapkan bahan serta terlibat dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027;
 - e. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.
5. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut:
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
 - b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
 - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja ke dalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;

- d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
- e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen; dan
- f. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melalui Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA,

ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199503 1 005

Lampiran SK TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : P-120/DPMPTSP/SET.3/900.1.1.2/01/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
KELOMPOK KERJA PENANAMAN MODAL		
3.	Pejabat Fungsional Ahli Madya Bidang Penanaman Modal selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
4.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang Penanaman Modal selaku Ketua Tim Kerja Promosi Penanaman Modal	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang Penanaman Modal Selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
KELOMPOK KERJA PTSP		
6.	Pejabat Fungsional Ahli Madya Bidang PTSP selaku Ketua Tim Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang PTSP selaku Ketua Tim Kerja Pengelopa Data dan Sistem Informasi	Anggota
KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT		
8.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Penanaman Modal selaku Ketua Tim Kerja Program dan Keuangan	Anggota
9.	Kasubag Umum dan Tata laksana	Anggota
10.	Pejabat Fungsional ahli Muda SDM selaku Ketua Tim Kerja Kepegawaian	Anggota
11.	Seluruh Pelaksana Program dan Keuangan	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP dalam satu tahun anggaran.

Renja DPMPTSP Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Tahun 2027 merupakan tahun akselerasi pembangunan daerah, sehingga Renja ini diarahkan untuk memperkuat peran penanaman modal sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan Renja ini dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis kinerja dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja Renstra, dinamika lingkungan strategis, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Fokus kebijakan DPMPTSP pada Tahun 2027 diarahkan pada pemulihan dan peningkatan kualitas investasi, penguatan sektor ekonomi non-ekstraktif, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan usaha yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Renja DPMPTSP Tahun 2027 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas perangkat daerah, serta dukungan para pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, kami berharap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tenggarong, 27 Juli 2026

Kepala,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu



Alfian Noor, SE., M.Ling.

Pembina Utama Muda

NIP. 196901131995031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	7
2.1 Evaluasi Capaian IKU dan IKD Tahun 2026 sampai Triwulan II.....	7
2.1.1 Evaluasi Capaian Tujuan (IKD).....	7
2.1.2 Evaluasi Capaian Sasaran (IKU).....	9
2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025 (IKU dan IKK Tahun Pertama Renstra 2025–2029).....	11
2.1.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	22
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Triwulan II.....	24
2.2.1 Evaluasi Program.....	24
2.2.2 Evaluasi Kegiatan.....	27
2.2.3 Evaluasi Sub Kegiatan.....	30
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.....	77
2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	80
2.5 Inovasi Daerah.....	81
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	84
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan dan Keselarasan Perangkat daerah	84
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara.....	86
3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2027.....	88

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....233

4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027.....233

4.2 Kontribusi terhadap program prioritas daerah, target nasional, SPM dan tematik.....252

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG.....259

5.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....259

5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....259

5.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....261

BAB VI PENUTUP.....263

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.....	9
Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Sasaran (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TC 30.....	13
Tabel 2.4 Program DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 Pasca Efisiensi Anggaran.....	26
Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 (TC-29).....	32
Tabel 2.6 Ringkasan Evaluasi Sub Kegiatan DPMPTSP Triwulan II Tahun 2026.....	64
Tabel 2.7. TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Rkpd Tahun 2027.....	65
Tabel 2.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	81
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP.....	88
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Awal Renja Tahun 2027.....	92
Tabel 4.1 TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028.....	235
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional.....	254
Tabel 5.1 ndikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027	260
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Penanaman Modal Tahun 2027.....	261

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Renja ini memiliki kedudukan strategis sebagai penghubung antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan daerah, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun secara terpadu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Melalui dokumen ini, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dirumuskan secara terukur untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Tahun 2027 menempati posisi penting dalam periode RPJMD 2025–2029 sebagai tahun akselerasi transformasi pembangunan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka logis dan road map pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada fase ini, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemanfaatan transformasi ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi peran sektor investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian berusaha melalui pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis risiko, serta mendorong peningkatan realisasi investasi,

khususnya pada sektor-sektor non-ekstraktif yang bernilai tambah. Peran ini menjadi semakin signifikan seiring dengan kedudukan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membuka peluang besar bagi pengembangan investasi di bidang industri pengolahan, pariwisata, agroindustri, ekonomi kreatif, dan jasa pendukung lainnya.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja Renstra, isu strategis pembangunan daerah, serta prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2027. Dokumen ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan investasi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Renja juga menjadi instrumen untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran tahunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Dengan demikian, penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang efektif, adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan keempat atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah sebagai pedoman perencanaan tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP ke dalam program dan kegiatan tahunan yang terukur dan realistis;
2. Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, dan kebijakan pembangunan daerah;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun Anggaran 2027;

4. Mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rencana kerja (Renja) yang meliputi:

1.1 Latar belakang

Latar belakang penyusunan Renja Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja.

1.2 Dasar hukum

Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Tahun 2027.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja 2027.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Menguraikan hasil evaluasi capaian IKD, IKU, pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2027 yang meliputi:

2.1 Evaluasi Capaian IKU dan IKD Tahun 2026 sampai Triwulan II yang menjelas terkait :

2.1.1 Evaluasi Capaian Tujuan (IKD)

2.1.2 Evaluasi Capaian Sasaran (IKU)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Triwulan II

Yang menjelaskan terkait :

2.2.1 Evaluasi Program

- 2.2.2 Evaluasi Kegiatan
- 2.2.3 Evaluasi Sub Kegiatan
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
 - Menjelaskan terkait permasalahan dan isu strategis di tahun 2027
- 2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Menjelaskan Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan masyarakat melalui Dewan Perwakilan rakyat.
- 2.5 Inovasi Daerah
 - Menjelaskan terkait inovasi perangkat daerah yang dikembangkan ditahun 2026.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - menjelaskan tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Tahun 2027 yang selaras dengan Renstra dan RPJMD.
 - 3.1 Analisis Hasil Evaluasi sebagai Dasar Penetapan Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2027
 - Menjelaskan Arah Kebijakan Pembangunan dan Keselarasan Perangkat Daerah
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Menjelaskan tujuan dan sasaran renja DPMPTSP
 - 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Tahun 2027
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,
 - menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan DPMPTSP Tahun 2027.
 - 4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027
 - 4.2 Kontribusi terhadap program prioritas daerah, target nasional, SPM dan tematik
- Bab V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Menguraikan terkait Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan indikator kinerja kunci yang diampu oleh perangkat daerah
 - 5.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - 5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 5.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Bab VI Penutup, berisi penegasan komitmen pelaksanaan Renja serta kaidah pelaksanaan dan pengendalian.

BAB II

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian IKU dan IKD Tahun 2026 sampai Triwulan II

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Renja Tahun 2026, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Tahun 2027.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kinerja dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II, yang meliputi capaian indikator tujuan (IKD), indikator sasaran (IKU), capaian kinerja program, capaian kinerja subkegiatan, serta realisasi fisik dan keuangan. Data evaluasi bersumber dari hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, serta data pendukung lainnya yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Namun demikian, beberapa indikator kinerja yang berkaitan dengan realisasi investasi belum dapat disajikan secara penuh karena masih menunggu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha dan proses verifikasi data oleh instansi terkait. Oleh karena itu, interpretasi capaian indikator investasi pada Triwulan II dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan status ketersediaan data yang ada.

2.1.1 Evaluasi Capaian Tujuan (IKD)

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan indikator tujuan berupa Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA). Target indikator tersebut pada Tahun 2027

sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan Renja adalah sebesar 0,80 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I, capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) menunjukkan pertumbuhan realisasi investasi sebesar -73,52 persen. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi investasi Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp3.394.151.543.587 terhadap realisasi investasi Tahun 2025 sebesar Rp12.816.525.047.627, sehingga menghasilkan pertumbuhan negatif sebesar 73,52 persen. Perhitungan tersebut mengikuti formula Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten/Kota sebagaimana digunakan dalam pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024

Penurunan pertumbuhan investasi pada Triwulan I tidak serta merta menunjukkan menurunnya daya tarik investasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh karakteristik pelaporan realisasi investasi yang bersifat kumulatif dan bergantung pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Selain itu, realisasi investasi pada Tahun 2025 relatif tinggi sehingga menjadi basis pembandingan yang menyebabkan persentase pertumbuhan pada Triwulan I Tahun 2026 terlihat menurun. Berdasarkan rekapitulasi investasi, total realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2026 terdiri atas PMA sebesar Rp1.100.154.167.820 dan PMDN sebesar Rp2.293.997.375.767, dengan total sebesar Rp3.394.151.543.587.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator belum dapat disajikan karena proses pelaporan realisasi investasi masih berlangsung. Data realisasi investasi masih menunggu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha serta proses verifikasi oleh Kementerian Investasi/BKPM. Oleh karena itu, capaian IKD Triwulan II akan disampaikan setelah seluruh data realisasi investasi telah tervalidasi sehingga dapat menggambarkan kondisi investasi secara lebih akurat.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum dapat diukur secara optimal, khususnya indikator yang berkaitan dengan realisasi investasi karena masih menunggu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan proses verifikasi oleh Kementerian Investasi/BKPM. Oleh karena itu, hasil evaluasi pada indikator tersebut bersifat sementara dan akan diperbarui setelah seluruh data tervalidasi.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Tujuan (IKD)	Target 2027	TW I	TW II	Keterangan
Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	0,80%	-73,52%	Belum tersedia	Data Triwulan II masih dalam proses pelaporan LKPM oleh pelaku usaha dan verifikasi Kementerian Investasi/BKPM.

Sumber Data : DPMPSTSP Kukar, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian IKD pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat menggambarkan kondisi investasi secara utuh karena proses pelaporan LKPM dan verifikasi data masih berlangsung. Oleh karena itu, evaluasi terhadap indikator ini akan disempurnakan setelah seluruh data investasi tervalidasi oleh Kementerian Investasi/BKPM sehingga dapat menjadi dasar penyusunan target dan strategi peningkatan investasi pada Renja Tahun 2027.

2.1.2 Evaluasi Capaian Sasaran (IKU)

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah, yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi Non-Ekstraktif. Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan investasi pada sektor-sektor di luar kegiatan ekstraktif sebagai salah satu upaya mendorong transformasi struktur ekonomi daerah menuju sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan metode penghitungan yang mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, nilai capaian indikator mencapai 50.814%. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi investasi sektor non-ekstraktif terhadap periode pembanding sesuai formula indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, angka capaian tersebut merupakan hasil pengukuran indikator kinerja sesuai metode yang ditetapkan dalam

regulasi, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan rumus pertumbuhan investasi konvensional.

Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya realisasi investasi pada sektor-sektor non-ekstraktif, terutama sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa, serta sektor ekonomi lainnya yang memiliki potensi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Berdasarkan data realisasi investasi Triwulan I Tahun 2026, investasi non-ekstraktif terdiri atas investasi PMDN sebesar Rp. 356.537.550.275,00 dan investasi PMA sebesar Rp. 90.109.031,102,00 atau sebesar \$ 5.631.814,44 sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan investasi daerah.

Secara substantif, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperbaiki iklim investasi mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif di luar pertambangan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 yang menekankan penguatan struktur ekonomi melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, jasa, konstruksi, dan sektor pendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meskipun demikian, hasil evaluasi pada Triwulan I masih bersifat sementara karena pelaporan realisasi investasi dilakukan secara bertahap melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sampai dengan Triwulan II, data realisasi investasi masih dalam proses pelaporan oleh pelaku usaha dan verifikasi oleh Kementerian Investasi/BKPM. Oleh karena itu, capaian indikator pada Triwulan II akan disampaikan setelah seluruh data realisasi investasi selesai diverifikasi sehingga dapat menggambarkan kondisi investasi secara lebih komprehensif.

Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Sasaran (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Renja 2026	Capaian TW I	Keterangan
Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi Non-Ekstraktif (%)	1,35%	50.814%	Perhitungan mengacu pada metode Indikator Kinerja Kunci sesuai

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Renja 2026	Capaian TW I	Keterangan
				Permendagri Nomor 19 Tahun 2024. Data TW II masih dalam proses pelaporan LKPM oleh pelaku usaha.
Meningkatnya pelayanan perizinan dan non-perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu	4,0	Belum tersedia	Menunggu hasil pengukuran indikator pada periode pelaporan berikutnya.

Sumber Data : DPMPTSP Kukar, 2026

Secara umum, capaian sasaran menunjukkan arah yang positif terutama pada indikator investasi sektor ekonomi non-ekstraktif. Namun demikian, indikator pelayanan publik belum dapat dievaluasi secara penuh karena masih menunggu hasil pengukuran pada akhir periode pelaporan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan Renja Tahun 2027 agar pengukuran seluruh indikator dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan komprehensif.

2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025 (IKU dan IKK Tahun Pertama Renstra 2025–2029)

Sebagai tindak lanjut hasil verifikasi Rancangan Renja Tahun 2027, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap capaian IKD dan IKU sampai Triwulan II Tahun 2026, tetapi juga terhadap capaian kinerja bidang urusan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator strategis perangkat daerah sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Tahun 2027.

Hasil evaluasi tersebut disajikan pada Tabel 2.3 (TC.30), yang memuat capaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah, target Renstra, realisasi, proyeksi, serta catatan analisis terhadap masing-masing indikator.

Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target Renstra pada tahun pertama sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada Tahun 2027.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(TC 30)

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	0	0,8	1	1,1	1,15	14,46	-21,93	0,8	1	
	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)			0	1,35	2,7	4,05	5,4	39,34	-47,49	1,35	2,7	
	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)			3,9	4	4,1	4,2	4,3	3,8	3,9	4	4,1	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)			78,54	79,33	79,72	80,12	80,52	74,13	78,54	79,47	79,72	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20	9	12	13	12	20	20	9	12	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	2	2	3	2	4	4	2	2	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6	1	3	3	3	6	6	1	3	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	1	2	2	2	1	1	1	2	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			66	100	100	100	100	66	66	100	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	12	4	4	4	0	0	12	0	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	1	4	4	4	0	0	1	0	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	4	4	4	1	1	1	0	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1	1	4	4	4	1	1	1	0	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			24	24	24	24	24	24	24	24	24	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1	1	4	4	4	1	1	1	0	
	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			2	1	1	1	1	2	2	1	1	
	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			1	0	1	0	0	1	1	0	1	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah			1	0	1	1	1	1	1	0	1	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	12	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0	0	3	0	0	0	0	0	3	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0	0	1	2	3	0	0	0	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0	0	2	2	2	0	0	0	2	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			75	160	119	119	119	75	75	160	119	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			150	75	119	119	119	150	150	75	119	
	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0	0	1	1	1	0	0	0	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					4	4	4				4	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			180	0	30	30	0	180	180	0	30	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4	4	1	1	1	4	4	4	1	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0	0	22	22	22	0	0	0	22	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			149	149	149	149	149	149	149	149	149	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	1	1	0	0	0	0	1	1	
	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana			0	0	1	1	1	0	0	0	1	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0	0	1	1	1	0	0	0	1	
	Realisasi total terhadap target investasi		Realisasi total Investasi	11,62	11,8	12,07	12,43	12,85	16,42	12,82	11,8	12,07	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	105,84	74,87	75,98	77,67	79,93	105,84	105,84	74,87	75,98	
	Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			2	0	2	0	0	2	2	0	2	
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			100	3	3	4	4	100	100	3	3	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran Data Potensi Investasi			0	0	5	5	5	0	0	0	5	
	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota			1	1	0	0	1	1	1	1	0	
	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota			3	3	0	2	1	3	3	3	0	
	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi			75	80	83	85	88	75	75	80	83	
	Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)			3	4	5	5	5	3	3	4	5	
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1	2	3	4	5	1	1	2	3	
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			1	1	0	2	0	1	1	1	0	
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha			75	77	79	80	82	75	75	77	79	
	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			400	561	210	450	240	400	400	561	210	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			30	32	34	35	36	30	30	32	34	
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			50	0	0	0	0	50	50	0	0	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP			1439	2496	2546	2597	2649	12757	1439	2496	2546	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			0	5	2	1	1	0	0	5	2	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1000	1082	1126	1170	1214	12757	1000	1082	1126	
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bag Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			100	100	1589	1640	1694	12757	100	100	1589	

No.	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			339	339	339	339	339	339	339	339	339	
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah			15	12	12	12	12	10	15	12	12	
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			15	12	12	12	12	10	15	12	12	

Sumber Data : data yang diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Tabel TC.30, capaian kinerja pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian indikator pelayanan internal telah mencapai target Renstra tahun pertama, terutama indikator yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah, penyusunan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan akuntabilitas kinerja telah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Di sisi lain, indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan realisasi investasi serta pertumbuhan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif masih menunjukkan capaian yang belum optimal dibandingkan target Renstra. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didominasi investasi berskala besar dengan realisasi yang fluktuatif, mekanisme penyampaian LKPM yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku usaha, serta proses verifikasi data oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif di luar pertambangan masih perlu diperkuat melalui peningkatan promosi investasi, penyederhanaan pelayanan perizinan berbasis risiko, penyediaan informasi potensi investasi yang lebih komprehensif, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pelaku usaha. Dengan demikian, target Renstra Tahun 2027 diharapkan dapat dicapai secara lebih optimal.

2.1.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun pertama pelaksanaan Renstra DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Indikator yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, penyusunan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, serta pelayanan internal menunjukkan capaian yang relatif baik dan perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas pengelolaan organisasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi aparatur.

Di sisi lain, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif masih dipengaruhi oleh dinamika realisasi investasi, mekanisme penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha, serta proses verifikasi data oleh Kementerian Investasi/BKPM. Kondisi tersebut mengakibatkan capaian indikator investasi pada Triwulan II belum sepenuhnya dapat menggambarkan kinerja investasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyampaian LKPM, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi penanaman modal untuk meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan validitas data investasi.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian target Renstra dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, DPMPTSP perlu terus memperkuat strategi peningkatan investasi pada sektor-sektor ekonomi non-ekstraktif yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa, pariwisata, serta sektor pendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan promosi investasi yang lebih terarah, penyediaan data potensi investasi yang akurat dan mutakhir, percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui implementasi OSS-RBA, serta pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan berusaha dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Rekomendasi hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 sehingga seluruh perencanaan yang disusun tidak hanya mempertahankan indikator yang telah mencapai target, tetapi juga mampu menjawab berbagai permasalahan yang masih dihadapi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah sebagaimana disajikan pada Tabel TC.30 menjadi dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini difokuskan pada tingkat ketercapaian target program yang

memperoleh dukungan pendanaan APBD Tahun 2026 sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Renja Tahun 2027.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Triwulan II

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran, penjadwalan ulang sebagian kegiatan, serta prioritas pelaksanaan belanja yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Meskipun demikian, seluruh program prioritas tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026, hanya dua program yang memperoleh alokasi anggaran sehingga dapat dievaluasi capaian pelaksanaannya. Empat program lainnya tetap tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah, namun tidak memperoleh pendanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap keempat program tersebut hanya dilakukan dari aspek keterkaitan dengan dokumen perencanaan, sedangkan evaluasi pelaksanaan difokuskan pada dua program yang didukung pendanaan APBD.

Hasil monitoring melalui Dashboard DALEV Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II, DPMPTSP melaksanakan 2 program, 7 kegiatan, dan 17 sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026. Realisasi keuangan mencapai Rp7.929.266.967 atau 28,73% dari pagu anggaran sebesar Rp27.599.231.938. Dari sisi kinerja, capaian program mencapai 47,00%, sedangkan capaian kinerja sub kegiatan mencapai 80,14%. Seluruh indikator outcome maupun indikator sub kegiatan telah terisi secara lengkap dengan tingkat keterisian mencapai 100%, yang menunjukkan proses pelaporan dan monitoring kinerja telah berjalan sesuai ketentuan.

2.2.1 Evaluasi Program

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, perangkat daerah memiliki enam program yang menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang penanaman modal. Keenam program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program

Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Namun demikian, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut berdampak pada perubahan struktur pendanaan perangkat daerah melalui rasionalisasi kegiatan dan pemusatan alokasi anggaran pada program yang diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat wajib. Akibat penyesuaian tersebut, tidak seluruh program yang tercantum dalam Renstra memperoleh dukungan anggaran pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil penyesuaian APBD Tahun 2026, hanya dua program yang memperoleh alokasi anggaran, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp21.024.487.981 dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan pagu sebesar Rp6.574.743.957, sehingga total pagu anggaran perangkat daerah menjadi Rp27.599.231.938. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan kedua program tersebut mencapai Rp7.929.266.967 atau 28,73% dari total pagu anggaran perangkat daerah.

Sementara itu, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tetap tercantum sebagai bagian dari struktur program dalam Renstra Tahun 2025–2029. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran, keempat program tersebut tidak memperoleh alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 sehingga tidak terdapat realisasi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan yang dapat dievaluasi pada Triwulan II. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak mencerminkan bahwa program-program tersebut dihapus atau tidak lagi menjadi prioritas pembangunan daerah, melainkan hanya mengalami penundaan pendanaan pada tahun berjalan.

Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan program sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 difokuskan pada dua program yang memperoleh dukungan anggaran, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal. Analisis evaluasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja, realisasi fisik, serta realisasi keuangan masing-masing program berdasarkan data pelaksanaan Renja Tahun 2026, sedangkan empat program lainnya hanya dijelaskan sebagai bagian dari struktur perencanaan perangkat daerah tanpa dilakukan analisis capaian pelaksanaan karena tidak didukung oleh alokasi anggaran pada tahun evaluasi.

Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian dalam menafsirkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah. Rendahnya capaian realisasi keuangan pada Triwulan II tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pelaksanaan program, tetapi lebih dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian anggaran yang membatasi jumlah program yang dapat dilaksanakan. Di sisi lain, perangkat daerah tetap berupaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja melalui pelaksanaan dua program prioritas sehingga fungsi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan fasilitasi investasi tetap dapat berjalan secara efektif.

Tabel 2.4 Program DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 Pasca Efisiensi Anggaran

No	Program	Status Tahun 2026	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dilaksanakan	Mendapat alokasi anggaran
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tidak dilaksanakan	Tidak memperoleh alokasi anggaran akibat efisiensi
3	Program Promosi Penanaman Modal	Tidak dilaksanakan	Tidak memperoleh alokasi anggaran akibat efisiensi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tidak dilaksanakan	Tidak memperoleh alokasi anggaran akibat efisiensi
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tidak dilaksanakan	Tidak memperoleh alokasi anggaran akibat efisiensi
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem	Dilaksanakan	Mendapat alokasi anggaran

No	Program	Status Tahun 2026	Keterangan
	Informasi Penanaman Modal		

Sumber Data : data yang diolah oleh penulis, 2026

2.2.2 Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada dua program yang memperoleh alokasi anggaran sebagai akibat kebijakan efisiensi belanja daerah Tahun Anggaran 2026. Kedua program tersebut terdiri atas 7 kegiatan dan 17 subkegiatan yang menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah.

Secara umum, capaian kegiatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator kegiatan telah mencapai target triwulanan sesuai tahapan pelaksanaan, meskipun realisasi keuangan masih relatif rendah karena sebagian besar pembayaran pekerjaan dilakukan pada semester kedua serta masih terdapat beberapa kegiatan yang berada pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyelesaian administrasi.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 12,39% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0 atau 12,39% dari pagu anggaran. Kegiatan telah menghasilkan berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan, antara lain Renja, laporan evaluasi kinerja, laporan capaian kinerja, dokumen statistik sektoral, serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Walaupun capaian tersebut masih nol akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut sudah berjalan sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan walaupun belum final, untuk menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan evaluasi perangkat daerah telah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung proses pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan DPMPSTSP.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan administrasi keuangan memiliki capaian kinerja sebesar 38,1% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.494.144.940 atau 12,56% dari pagu kegiatan. Tingginya realisasi terutama berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN, penyusunan

laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan akuntansi, serta penyusunan laporan semester.

Kegiatan ini merupakan penyumbang terbesar terhadap realisasi keuangan perangkat daerah karena sebagian besar belanja pegawai direalisasikan secara rutin setiap bulan.

Tingginya capaian kegiatan Administrasi Keuangan disebabkan karena belanja pegawai merupakan belanja rutin yang direalisasikan setiap bulan, sedangkan belanja barang dan belanja modal sebagian besar baru direalisasikan pada semester kedua. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi kegiatan ini relatif lebih tinggi dibandingkan kegiatan lainnya.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sampai dengan Triwulan II, kegiatan administrasi barang milik daerah telah mencapai 4,67% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0 Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada inventarisasi aset, penyusunan kebutuhan barang milik daerah, serta penatausahaan aset.

Realisasi keuangan masih relatif rendah karena sebagian besar pengadaan barang dan penyelesaian administrasi aset dijadwalkan pada semester kedua.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum mencapai 20,42% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0 Output kegiatan berupa penyediaan alat tulis kantor, rapat koordinasi, pengelolaan arsip, penyediaan bahan logistik, serta pelayanan administrasi umum telah berjalan sesuai jadwal.

Capaian kegiatan administrasi umum menunjukkan bahwa pelayanan administrasi internal tetap berjalan sesuai kebutuhan organisasi meskipun realisasi keuangan masih rendah. Kondisi tersebut disebabkan sebagian belanja operasional dan pengadaan barang pendukung administrasi baru direalisasikan pada semester kedua sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah masih menunjukkan realisasi yang relatif rendah dengan capaian **0%** karena sebagian besar paket pengadaan masih berada pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mencapai 7,5% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 435.122.027 Seluruh pelayanan rutin seperti listrik, internet, air, telepon, jasa kebersihan, dan pelayanan administrasi perkantoran berjalan sesuai kebutuhan operasional perangkat daerah.

7. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang mendukung digitalisasi pelayanan perizinan dan pengelolaan data investasi. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan mencapai 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0 dari pagu sebesar Rp6.574.743.957.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pengembangan sistem informasi, pemutakhiran basis data perizinan, integrasi pelayanan OSS-RBA, serta penyediaan informasi penanaman modal. Sampai dengan Triwulan II, sebagian besar pekerjaan masih berada pada tahap pengembangan sistem dan penyelesaian kontrak sehingga realisasi keuangan belum optimal, namun capaian fisik kegiatan telah menunjukkan perkembangan sesuai tahapan yang direncanakan.

Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui penguatan implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), sekaligus meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Ketersediaan data investasi yang berkualitas menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun kebijakan, melakukan evaluasi kinerja penanaman modal, serta merumuskan strategi peningkatan investasi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan pengembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penguatan sistem informasi penanaman modal tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, tetapi juga mendukung penyediaan data investasi yang valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, pemetaan potensi investasi daerah, evaluasi kinerja penanaman modal, serta penyusunan strategi promosi investasi yang lebih tepat sasaran. Dengan tersedianya data yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mempercepat pelayanan kepada investor, serta mendukung terwujudnya tata kelola penanaman modal yang transparan dan berbasis data.

Pada Tahun 2026 DPMPSTSP juga mengembangkan inovasi KuKargo sebagai katalog digital produk UMKM berbasis elektronik yang mendukung promosi investasi daerah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas data pelaku usaha tetapi juga menjadi media promosi investasi daerah melalui

penyediaan informasi produk lokal yang telah diverifikasi sehingga mendukung pengembangan ekonomi digital Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2.3 Evaluasi Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan unit pelaksanaan terkecil yang secara langsung menghasilkan output dalam mendukung pencapaian target kegiatan, program, sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 17 sub kegiatan yang tersebar pada 7 kegiatan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui aplikasi DALEV, capaian kinerja sub kegiatan mencapai 80,14%, sedangkan keterisian indikator sub kegiatan telah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh sub kegiatan telah memiliki indikator kinerja yang terukur dan telah dilakukan pelaporan sesuai mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah.

Secara umum, pelaksanaan sub kegiatan menunjukkan perkembangan yang baik. Sebagian besar sub kegiatan telah menghasilkan output sesuai target Triwulan II, terutama sub kegiatan yang bersifat administratif dan operasional, seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan kinerja, serta pelayanan administrasi perkantoran. Tingginya capaian pada sub kegiatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya relatif rendah meskipun progres fisik telah berjalan sesuai tahapan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung, penyelesaian administrasi kontrak, serta mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Selain itu, beberapa sub kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan dokumen teknis investasi memang dijadwalkan penyelesaiannya pada semester kedua Tahun Anggaran 2026 sehingga realisasi anggarannya belum optimal sampai dengan Triwulan II.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat diketahui bahwa rendahnya realisasi keuangan tidak mencerminkan rendahnya capaian kinerja

perangkat daerah. Sebagian besar indikator output telah tercapai sesuai target dan tahapan pelaksanaan yang direncanakan, sedangkan penyerapan anggaran masih dipengaruhi oleh jadwal pengadaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran kontrak yang sebagian besar dilakukan setelah pekerjaan selesai, serta kebijakan efisiensi anggaran daerah yang menyebabkan penyesuaian volume dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tepat dinilai berdasarkan pencapaian output dan outcome kegiatan daripada hanya berdasarkan persentase realisasi keuangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2027 agar lebih efektif, efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa strategi pemusatan anggaran pada kegiatan prioritas mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja DPMPTSP secara umum berjalan sesuai tahapan yang direncanakan meskipun realisasi keuangan belum sepenuhnya mencerminkan capaian fisik akibat karakteristik pelaksanaan kontrak, jadwal pembayaran, serta kebijakan efisiensi anggaran daerah. Rincian hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel TC.29.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 (TC-29)

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
										Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
Tujuan						Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	1,2 Persen	14,46 Persen	0	-21,93	#DIV/0!	0,8	0,8	66,67
Sasaran						Meningkatnya Nilai realisasi investasi PMDN/PMA	Nilai realisasi Investasi PMDN/PMA	7,4 Triliun rupiah	14,81 Triliun rupiah	7,35	16,42	223,40	7,4	16,42	221,89
						Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu	4,4 nilai	3,8 Nilai	3,9	3,9	100,00	4	4	90,91
2	18	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	88 Nilai	94,9 Nilai	78,54	79,47	101,18	79,33	79,33	90,15

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n- 3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	58 Dokumen	16 Dokumen	20	20	100	9	6	10,34
2	18	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	11 Dokumen	4 Dokumen	5	5	100	2	0	0
2	18	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4 Dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2	18	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
										Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	0	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
										Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Laporan	9 Laporan	9	9	100	0	0	0	
2	18	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2 Laporan	1	1	100	0	0	0	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	0	0	0
2	18	1	02.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	5 Data	1 Data	1	1	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan					Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara	1 Berita Acara	1	2	200	0	0	0
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	4	2	10,00
2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	500 Orang/Bulan	66 Orang/Bulan	100	100	100	100	1400	280,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1	1	100	1	1	20,00
2	18	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lnjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1	3	100	0	0	0,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24	24	100	24	12	10,00
2	18	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	0	0	0,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4	4	100	0	0	0,00
2	18	1	02.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	0	0	0
2	18	1	02.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	6 laporan	0 laporan	1	1	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.03	04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	30 Dokumen	6 Dokumen	6	6	100	0	0	0
2	18	1	02.03	05	Penata Usaha Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	0	0	0
2	18	1	02.03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang Milik SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1	1	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	0	0	0,00
2	18	1	02.04	01	Rencana Pengelolaan retribusi Daerah	Jumlah dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2	18	1	02.04	02	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	20 Laporan	12 Dokumen	12	12	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	0	0	0
2	18	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9 paket	0 paket	0	0	100	0	0	0,00
2	18	1	02.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	4 Dokumen	4	4	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	636 Orang	150 Orang	15	15	100	0	0	0,00
2	18	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	551 Orang	300 Orang	75	75	100	0	0	0
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	4	2	10

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1	1	100	1	1	20,00
2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1	1	100,00	1	1	20,00
2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	10 paket	2 paket	2	2	100,00	1	1	10,00
2	18	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12	12	100,00	0	0	0,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100,00	12	7	11,67
2	18	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Dokumen	500 Dokumen	500	500	100,00	0	0	0,00
2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	60 Unit	20 Unit	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	4	2	10
2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0 Laporan	0	0	#DIV/0!	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	7	11,67
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	7	11,67

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	7	11,67
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	4	2	50

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	88 unit	48 unit	23	23	100	23	4	4,55
2	18	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	745 unit	149 unit	149	149	100	72	10	1,34

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n- 3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	2	2	100	7	0	0
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total investasi	62,54 Triliun rupiah	16,42 Triliun rupiah	7,4	12,82	173,24	11,8	3,36	5,37
						Realisasi Total terhadap Target Investasi yang diberikan oleh provinsi	85,99 Persentase	105,8 Persentase	105,84	80	75,59	74,87	20,46	23,79

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Invrstasi	20 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100	0	0	0
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	10 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100	0	0	0
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	90 Persentase	100 Persentase	260	184	70,77	0	0	0,00
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)	5 Dokumen	183 Dokumen	260	184	70,77	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	2	02.02	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2	2	100	0	0	0
2	18	2	02.02	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	4 Dokumen	4	4	80	0	0	0
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	100	100	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	12990 Izin	12757 Izin	13633	13633	100	0	0	0
2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5850 Pelaku Usaha	12757 Pelaku Usaha	13633	13633	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan		
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	
2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bag Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	339	Kegiatan Usaha	339	Kegiatan Usaha	339	339	100	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n- 3 (2024)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
													Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		3		4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		6771	Pelaku Usaha	100	Orang	100	100	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	4	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0	0	100	0	0	0
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	84 Persentase	100 Persentase	30,47	51,38	168,62	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n- 3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun	20 Laporan	6 Laporan	550	550	100	0	0	0
2	18	5	02.01	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan usaha	24 Kegiatan usaha	2	2	100	0	0	#DIV/0!

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n- 3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	5	02.01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1716 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	221	221	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	5	02.01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	170 Kegiatan usaha	42 Kegiatan usaha	100	100	100	0	0	0

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
									Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	500 Persentase	100 Persentase	10	10	100	100		0
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	60 Jumlah data	10 Dokumen	10	10	100	12		0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n- 3 (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan	
					Target RENJA - PD TAHUN n-2 (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2026)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2 18 6 02.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	60 Jumlah data	10 Dokumen	10	10	100	12		0

Adapun ringkasan evaluasi sub kegiatan sampai dengan triwulan II di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6

Ringkasan Evaluasi Sub Kegiatan DPMPTSP Triwulan II Tahun 2026

Uraian	Capaian
Jumlah Sub Kegiatan	17
Capaian Kinerja Sub Kegiatan	80,14%
Keterisian Indikator	100%
Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp7.929.266.967
Persentase Realisasi Keuangan	28,73%

Sumber data : Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, dilakukan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Hasil reviu tersebut menjadi dasar penyusunan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Reviu TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2027 (TC-31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				26.006.463.819,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				20.570.968.683,00	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	79,72	18.786.463.819,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	79,72	16.661.699.683,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	977.661.130,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	205.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	165.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	120.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	55.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	110.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000,00	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	55.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2	322.661.130,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	11.886.616.683,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	12.410.128.380,00	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	11.381.533.629,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	12.081.994.780,00	
9						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	318.133.600,00	Dilakukan penambahan sub kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari temuan BPK terkait persamaan persepsi dari penerjemahan Perpres 33 Tahun 2020 hingga perubahan terakhir Perpres 72 tahun 2025
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	37.125.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	37.125.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	20.574.180,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	318.133.874,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	37.125.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	181.498.900,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	16.498.900,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	55.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	44.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	55.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	11.000.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			
4	Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4	92.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4 Laporan	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	20.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	
22	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	50.000.000,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	
23	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	22.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	957.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	250.000.000,00	
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	75.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
25	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	1	150.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	50.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
27	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	75.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
28	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	119	357.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	250.000.000,00	
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	119	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	1.522.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	1.048.384.197,00	
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	50.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	330.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	
32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	325.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	
33	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	255.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	27.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.500.000,00	
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	410.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	300.000.000,00	
36	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	75.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	30.884.197,00	
37	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	50.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	150.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
38	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	150.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
39	Pengadaan Aset tak berwujud	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Pengadaan Aset tak berwujud	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	1.803.477.106,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	1.803.477.106,00	
42	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	296.766.216,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	296.766.216,00	
43	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	40.000.000,00	
44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.466.710.890,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.366.710.890,00	Dilakukan pergeseran pagu anggaran untuk suporting program nasional di sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	4	1.115.710.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	4 Laporan	899.710.000,00	
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	69.320.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	69.320.000,00	
46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	496.390.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	496.390.000,00	
47	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149	90.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	90.000.000,00	
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	460.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	244.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana	1	100.000.000,00	Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana		0,00	
49	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	100.000.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Realisasi total terhadap target investasi	12,07	1.075.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Realisasi total terhadap target investasi	12,07 Triliun Rupiah	1.275.000.000,00	
			Realisasi Total terhadap Target Investasi	75,98				Realisasi Total terhadap Target Investasi	75,98 Persen		
11	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan.	1	825.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan.	1	225.000.000,00	
50	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	330.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 peraturan	150.000.000,00	
51	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3	495.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	20 Daerah	75.000.000,00	
12	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	4	250.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	4 Dokumen	1.050.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Pemutakhiran Data Potensi Invetasi pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran Data Potensi Invstasi	5	250.000.000,00	Pemutakhiran Data Potensi Invetasi pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran Data Potensi Invstasi	3 Kesepatan	225.000.000,00	
53	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	1 Naskah	75.000.000,00	
54	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota			Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000,00	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Kutai Kartanegara	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	83	825.000.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	Kutai Kartanegara	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	83 persen	460.269.000,00	
13	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)	5	825.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)	5 Loi	460.269.000,00	
55	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	825.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	340.269.000,00	
56	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kutai Kartanegara	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	79	825.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kutai Kartanegara	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	79 Persen	619.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun</i>	<i>4</i>	<i>825.000.000,00</i>	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>619.000.000,00</i>	
57	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	210	495.000.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	210 Pelaku Usaha	345.000.000,00	
58	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	33	330.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	33 Kegiatan Usaha	274.000.000,00	
59	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan usaha	100.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu anggaran untuk suporting program nasional dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kutai Kartanegara	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100	1.495.000.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kutai Kartanegara	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 Persen	930.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP</i>	<i>2546</i>	<i>1.495.000.000,00</i>	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP</i>	<i>2546 Ijin</i>	<i>930.000.000,00</i>	
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			
61	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1126	440.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1126 Pelaku Usaha	400.000.000,00	
62	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1589	330.000.000,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1589 Pelaku Usaha	280.000.000,00	
63	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bag Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	339	525.000.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bag Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	332 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kutai Kartanegara	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100	3.000.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kutai Kartanegara	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 Persen	625.000.000,00	
16	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	12	3.000.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	12 Dokumen	625.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	3.000.000.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	625.000.000,00	

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tetap mampu mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak seluruh program memperoleh alokasi pendanaan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2027 diarahkan untuk mengoptimalkan program yang secara langsung mendukung peningkatan investasi, kualitas pelayanan publik, penguatan data investasi, serta efektivitas pengendalian penanaman modal.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029, serta dinamika pembangunan daerah dan kebijakan nasional yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja indikator output sebagian besar telah sesuai target, realisasi keuangan perangkat daerah baru mencapai sekitar 28,73%, sedangkan capaian outcome Renstra mencapai 20,40%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah, proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung, serta mekanisme pembayaran kontrak yang sebagian besar dilakukan setelah pekerjaan selesai. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan Tahun 2027 tidak hanya didasarkan pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja program dan pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang pelayanan perizinan, tantangan yang masih dihadapi adalah meningkatnya tuntutan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) telah memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan, namun efektivitasnya masih

memerlukan dukungan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan proses bisnis, integrasi data antarinstansi, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis yang menerbitkan persetujuan teknis maupun rekomendasi perizinan. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang yang sangat besar dalam meningkatkan investasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Posisi strategis tersebut berpotensi menarik investasi baru pada sektor industri pengolahan, perdagangan, logistik, jasa, pariwisata, pertanian modern, serta sektor-sektor non-ekstraktif lainnya. Namun demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih diperlukan penguatan promosi investasi, penyediaan informasi peluang investasi yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas data investasi, serta pemberian kemudahan dan kepastian berusaha yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Kondisi ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra DPMPTSP yang menempatkan peningkatan investasi sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung transformasi ekonomi daerah.

Selain aspek pelayanan dan investasi, pengelolaan data serta sistem informasi penanaman modal menjadi isu strategis yang semakin penting. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik menuntut tersedianya data investasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Data investasi yang berkualitas tidak hanya mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan promosi investasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap realisasi penanaman modal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data dan sistem informasi penanaman modal merupakan salah satu prioritas yang harus terus ditingkatkan pada Tahun 2027.

Selain itu, ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha masih menjadi tantangan dalam penyediaan data investasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan penyampaian LKPM berpengaruh terhadap kualitas basis data investasi yang digunakan dalam proses monitoring, evaluasi, penyusunan kebijakan, serta pengukuran capaian

realisasi investasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan, pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sistem OSS-RBA sebagai media pelaporan investasi secara elektronik.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian penanaman modal. Pengawasan terhadap realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha masih memerlukan peningkatan agar seluruh kegiatan investasi yang telah memperoleh perizinan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan yang efektif menjadi penting untuk memastikan bahwa investasi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan daerah.

Dari sisi kelembagaan, penguatan kapasitas aparatur juga menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan. Perubahan regulasi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berbasis risiko, serta perkembangan teknologi informasi menuntut aparatur DPMPTSP memiliki kompetensi yang adaptif dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja Tahun 2027. Isu strategis tersebut meliputi perlunya peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis digital melalui optimalisasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), penguatan tata kelola data dan sistem informasi penanaman modal yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, peningkatan daya saing investasi daerah melalui penyediaan informasi potensi investasi yang lebih komprehensif, serta penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan realisasi investasi. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan kapasitas kelembagaan

juga menjadi kebutuhan penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel. Berbagai isu strategis tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan melalui pengembangan investasi yang berkualitas, peningkatan perekonomian daerah, pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, serta perluasan investasi pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2027 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Isu-isu strategis tersebut selaras dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 yang menempatkan peningkatan investasi berkualitas, penguatan pelayanan publik berbasis digital, reformasi birokrasi, dan pengembangan sektor ekonomi non-ekstraktif sebagai prioritas pembangunan daerah.

2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil inventarisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027, tidak terdapat usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan DPMPTSP. Dengan demikian, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP Tahun 2027 tidak didasarkan pada usulan Pokir DPRD, melainkan mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya.

Meskipun tidak terdapat Pokir DPRD yang menjadi kewenangan perangkat daerah, DPMPTSP tetap mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program peningkatan investasi, penguatan iklim investasi, promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta penguatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Seluruh program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam

meningkatkan daya saing investasi, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Pokok Pikiran DPRD	Lokasi	Program/ Kegiatan	Keterangan
-	Nihil	-	-	Berdasarkan hasil inventarisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 tidak terdapat usulan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sumber Data : Data diolah oleh Penulis, 2026

2.5 Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi daerah sekaligus memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara mengembangkan inovasi KuKargo (Kutai Kartanegara Digital Catalog) sebagai media promosi digital berbasis katalog elektronik yang menghubungkan pelaku usaha lokal dengan calon pembeli secara langsung tanpa perantara. Inovasi ini merupakan salah satu strategi transformasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses pasar produk lokal sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem investasi daerah.

Pengembangan KuKargo dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Platform perdagangan elektronik konvensional pada umumnya mengenakan biaya administrasi maupun komisi transaksi yang mengurangi margin keuntungan pelaku usaha. Selain itu, mekanisme marketplace terbuka belum sepenuhnya menjamin legalitas maupun kualitas produk sehingga tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan daya saing UMKM sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, KuKargo dikembangkan sebagai katalog digital resmi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempertemukan produsen dan konsumen melalui sistem user-to-user. Berbeda dengan marketplace komersial, platform ini tidak memfasilitasi

transaksi keuangan maupun pemotongan komisi, sehingga seluruh hasil penjualan diterima secara penuh oleh pelaku usaha. Fungsi utama KuKargo adalah sebagai media promosi, etalase digital, dan penghubung antara pelaku usaha dengan calon pembeli sehingga mampu memperluas akses pasar tanpa membebani UMKM dengan biaya promosi maupun biaya layanan platform.

Keunggulan utama inovasi KuKargo terletak pada adanya mekanisme verifikasi resmi oleh DPMPTSP sebelum suatu produk dipublikasikan pada katalog digital. Proses verifikasi dilakukan terhadap legalitas pelaku usaha, kelengkapan perizinan dasar, serta kelayakan produk sehingga seluruh produk yang ditampilkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan marketplace terbuka. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM Kutai Kartanegara sekaligus memperkuat citra daerah sebagai wilayah yang memiliki ekosistem investasi dan usaha yang sehat serta berdaya saing.

Pelaksanaan inovasi KuKargo dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu pendaftaran dan pengunggahan data produk oleh pelaku usaha, verifikasi legalitas dan standar produk oleh DPMPTSP, publikasi produk pada katalog digital, serta komunikasi langsung antara penjual dan pembeli untuk proses transaksi. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menjamin kualitas informasi produk, sedangkan transaksi tetap dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa keterlibatan pemerintah dalam proses pembayaran.

Dari aspek ekonomi, inovasi KuKargo memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Seluruh layanan promosi diberikan tanpa biaya (Rp0) sehingga pelaku usaha tidak lagi terbebani biaya administrasi, biaya komisi, maupun biaya promosi rutin sebagaimana pada platform digital komersial. Efisiensi biaya tersebut memungkinkan pelaku usaha mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, pengemasan, maupun pengembangan usaha. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan dalam menemukan berbagai produk lokal yang telah terverifikasi melalui satu platform resmi pemerintah.

Selain memberikan manfaat bagi pelaku usaha, KuKargo juga menjadi instrumen pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal. Melalui data yang terintegrasi dalam sistem, DPMPTSP dapat melakukan pemetaan potensi UMKM berdasarkan sektor usaha, wilayah, serta tingkat legalitas pelaku usaha. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan promosi investasi, pendampingan legalitas usaha, pengembangan

kemitraan, serta penyusunan program peningkatan kapasitas UMKM. Inovasi ini sekaligus mendukung percepatan transformasi ekonomi digital daerah, peningkatan jumlah pelaku usaha formal, serta optimalisasi pelayanan perizinan melalui integrasi dengan layanan PILOTS yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

Ke depan, KuKargo diharapkan menjadi bagian dari strategi penguatan iklim investasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyediaan katalog digital produk unggulan daerah yang terintegrasi, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun calon investor. Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi non-ekstraktif, serta pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, KuKargo tidak hanya berfungsi sebagai media promosi produk lokal, tetapi juga sebagai instrumen pendukung peningkatan daya saing investasi daerah melalui penguatan ekosistem usaha yang modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi perbaikan sebagaimana diuraikan pada bab ini, maka penyusunan tujuan, sasaran, serta program prioritas DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut. Uraian mengenai tujuan, sasaran, dan program prioritas dimaksud disajikan pada Bab III.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Analisis Hasil Evaluasi sebagai Dasar Penetapan Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2027

Penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, capaian kinerja tahun pertama Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Renja Tahun 2027 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Hasil evaluasi pada Bab II menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Indikator yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, administrasi perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, serta akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif dan menjadi modal yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah pada tahun berikutnya.

Di sisi lain, evaluasi juga menunjukkan bahwa indikator yang berkaitan dengan peningkatan realisasi investasi masih menghadapi beberapa kendala. Capaian indikator pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif masih dipengaruhi oleh karakteristik penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku usaha serta proses verifikasi data oleh Kementerian Investasi/BKPM. Akibatnya, capaian indikator investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi investasi secara komprehensif karena masih menunggu proses validasi data.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi pada Tahun 2027 tidak hanya diarahkan pada peningkatan nilai realisasi investasi, tetapi juga perlu didukung oleh penguatan kualitas data investasi, peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha agar indikator kinerja yang dihasilkan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi terhadap capaian tahun pertama Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 juga menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan internal telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, indikator strategis yang berkaitan dengan peningkatan investasi daerah masih memerlukan upaya penguatan agar target Renstra pada tahun-tahun berikutnya dapat dicapai secara optimal. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa fokus pembangunan bidang penanaman modal pada Tahun 2027 perlu diarahkan pada peningkatan kualitas investasi, khususnya investasi yang memberikan nilai tambah, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta mendukung transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor non-ekstraktif.

Berdasarkan hasil evaluasi IKU dan IKK Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel TC.30 Bab II, sebagian besar indikator pelayanan internal telah mencapai target Renstra tahun pertama, antara lain indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, serta administrasi perangkat daerah. Namun demikian, indikator strategis yang berkaitan dengan Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) dan Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi Non-Ekstraktif belum mencapai target Renstra Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sasaran utama perangkat daerah masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas promosi investasi, optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM, serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 diarahkan sebagai langkah percepatan pencapaian target Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Selain capaian indikator kinerja, hasil evaluasi pelaksanaan program menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 menyebabkan hanya sebagian program memperoleh dukungan pendanaan APBD. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi

pencapaian target kinerja perangkat daerah karena pelaksanaan program tetap difokuskan pada kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Tahun 2027 agar alokasi sumber daya dan pendanaan lebih diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat paling besar terhadap peningkatan investasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 tidak hanya mempertahankan indikator yang telah menunjukkan capaian baik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat indikator yang masih memerlukan peningkatan, khususnya yang berkaitan dengan realisasi investasi dan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026, capaian tahun pertama Renstra Tahun 2025–2029, kemampuan keuangan daerah, dinamika pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 tetap mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029, namun target kinerjanya disusun secara lebih terarah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sehingga mampu menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.2.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab II serta dengan mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan berusaha. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut juga mempertimbangkan dinamika perkembangan investasi, kondisi pelayanan publik, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Tujuan Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tujuan ini selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 yaitu meningkatnya investasi daerah, sekaligus mendukung penguatan daya saing daerah sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Indikator tujuan yang digunakan adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama. Sasaran pertama adalah meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah, yang diukur melalui indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi Non-Ekstraktif. Sasaran ini diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah, memperkuat diversifikasi ekonomi daerah, serta mendukung transformasi struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya pelayanan perizinan dan non-perizinan usaha, yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu. Sasaran ini merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target tujuan dan sasaran tersebut disusun secara bertahap sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kondisi riil pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2027.

Target tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Rincian tujuan, sasaran, indikator, baseline, dan target kinerja disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KETERAN GAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(9)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
Meningkat nya Investasi Daerah	Meningkatk an Penanaman Modal di Kutai Kartanegara		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-29,18	0,8	1	1,10	1,15	1,20	
		Meningkatny a nilai tambah baru yang diinvestasik an dalam pembangun an ekonomi wilayah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non- Ekstraktif (%)	-54,17	1,35	2,70	4,05	5,40	6,70	
		Meningkatny a pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	

Sumber Data : Renstra DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara, 2025-2029

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi pada Bab II, terutama peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, penguatan tata kelola data investasi dan pelaporan LKPM, peningkatan promosi investasi sektor non-ekstraktif, serta penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

3.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Prioritas Tahun 2027

Program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran Renja sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.2 serta merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan pada Bab II. Penyusunannya mengacu pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, meskipun terdapat beberapa indikator strategis yang masih memerlukan penguatan. Indikator pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif masih dipengaruhi oleh karakteristik pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), proses verifikasi data investasi oleh Kementerian Investasi/BKPM, serta kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak seluruh program memperoleh dukungan pendanaan APBD. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas program Tahun 2027 agar sumber daya yang tersedia difokuskan pada program yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah.

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, penyusunan program Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan investasi daerah, pengembangan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha, penguatan tata kelola data penanaman modal, serta peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Seluruh program dirancang saling mendukung sehingga mampu mempercepat pencapaian indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi salah satu program prioritas karena secara langsung mendukung peningkatan kualitas realisasi investasi melalui pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaku usaha, peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM, serta penguatan validitas data investasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi investasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA).

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diprioritaskan untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penyederhanaan proses pelayanan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, penyediaan informasi peluang investasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Program ini mendukung sasaran peningkatan investasi pada sektor ekonomi non-ekstraktif yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sehingga mampu

memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program Promosi Penanaman Modal diarahkan pada kegiatan promosi investasi yang lebih terarah berdasarkan potensi unggulan daerah, kebutuhan pasar, dan peluang investasi yang memberikan dampak terhadap peningkatan investasi berkualitas. Pelaksanaan promosi investasi difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah.

Selain program yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan investasi, Program Pelayanan Penanaman Modal tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini juga mendukung optimalisasi pemanfaatan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data investasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan penanaman modal, penyediaan informasi potensi investasi, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Penguatan sistem informasi ini juga menjadi salah satu tindak lanjut atas hasil evaluasi Bab II yang menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas data investasi melalui penyempurnaan pelaporan LKPM dan integrasi data antarinstansi.

Di samping program urusan penanaman modal, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tetap dilaksanakan sebagai pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Program penunjang ini menjadi fondasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan seluruh program teknis DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026, program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Tahun 2027 disusun untuk menjawab berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sekaligus mempertahankan capaian indikator yang telah menunjukkan

kinerja baik. Penyusunan program dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029.

Program-program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang berlaku sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah. Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Awal Renja Tahun 2027

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara				Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)		
		Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah			Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Perangkat Daerah	Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lingkup Perangkat Daerah (Data)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang	2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					disusun (Dokumen)		
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan	2.18.01.2.02 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semester an SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semester an SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Daerah pada SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Daerah SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah			
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi	2.18.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepegawaian (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perundang- Undangan (Orang)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring,	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Peraturan Perundang- Undangan	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Konsultasi SKPD (Laporan)		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Disediakan (Unit)		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi total investasi (triliun rupiah)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan. (Perbup/Perda) yang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				mendukung sektor non- ekstraktif)	di daerah (Dokumen)	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		
				Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terkendaliny a pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					membuka usaha (%)		
				Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		
		Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha			Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)		
			Meningkatny a Akuntabilita s Dan		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien			DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa	2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemeriksaan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Anggaran (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Daerah SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pada SKPD (Laporan)		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	2.18.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah	Informasi Kepegawaian (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perundang- Undangan (Orang)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring,	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Peraturan Perundang- Undangan	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Konsultasi SKPD (Laporan)		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata	2.18.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Laksana (Laporan)		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				sesuai SP dan SOP	Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insent if yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Kegiatan Usaha)		
			Meningkatny a pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan beserta kebutuhan pendanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027 yang diuraikan pada Bab IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Penyusunannya juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab II, meliputi evaluasi capaian indikator kinerja daerah (IKD), indikator kinerja utama (IKU), capaian program, kegiatan, subkegiatan, serta evaluasi capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun pertama Renstra.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program, kegiatan, dan subkegiatan telah terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan, administrasi perangkat daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, indikator yang berkaitan dengan peningkatan realisasi investasi dan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif masih memerlukan penguatan karena dipengaruhi oleh proses penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), verifikasi data investasi oleh Kementerian Investasi/BKPM, serta kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan sebagian kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyusunan rencana kerja Tahun 2027 diarahkan untuk mempertahankan program yang telah menunjukkan kinerja baik sekaligus memperkuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan investasi daerah, peningkatan investasi sektor ekonomi non-ekstraktif, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha, penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan iklim investasi, promosi investasi, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based planning*) serta prinsip *money follows program* dan *money follows priority*,

sehingga alokasi pendanaan diprioritaskan pada program yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

Selanjutnya, rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, dan prakiraan maju Tahun 2028 disajikan pada Tabel 4.1 (TC.33).

Dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana diuraikan pada Bab II, maka rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut sekaligus untuk mendukung pencapaian target Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Tabel 4.1 TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan					Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara		Kab. Kutai Kartanegara	1 Persen	20.570.968.683,00	APBD		1,1 Persen	26.510.831.784,00
Sasaran					Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah		Kab. Kutai Kartanegara	2,70 Persen		APBD		4,05 Persen	
Sasaran					Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha		Kab. Kutai Kartanegara	4,1 Nilai		APBD		4,2 Nilai	
X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	Kab. Kutai Kartanegara	79,72	16.561.699.683,00			80,12	19.410.927.864
X	XX	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	8 Dokumen	205.000.000,00			13	717.000.000
X	XX	1	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	50.000.000,00			3	180.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	30.000.000,00			3	165.000.000
X	XX	1	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	50.000.000,00			2	132.000.000
X	XX	1	02.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara					1	60.000.000
X	XX	1	02.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	50.000.000,00			1	120.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	25.000.000,00			1	60.000.000
X	XX	1	02.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara						
X	XX	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	12.410.128.380,00			4	11.905.478.189
X	XX	1	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang/bulan	12.081.994.780,00			100	11.381.533.629
X	XX	1	02.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	318.133.600,00		Dilakukan penambahan sub kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari temuan BPK terkait persamaan presepro dari penerjemahan Perpres 33 Tahun 2020 hingga perubahan terakhir Perpres 72 tahun 2025		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					12	40.500.000
X	XX	1	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					1	40.500.000
X	XX	1	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00			1	60.000.000
X	XX	1	02.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara					1	22.444.560
X	XX	1	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					24	320.000.000
X	XX	1	02.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara					1	40.500.000
X	XX	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara					4	197.998.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					2	17.998.800
X	XX	1	02.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					1	60.000.000
X	XX	1	02.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					6	48.000.000
X	XX	1	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					12	60.000.000
X	XX	1	02.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara					1	12.000.000
X	XX	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	45.000.000,00			4	79.000.000
X	XX	1	02.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00			0	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00			1	55.000.000
X	XX	1	02.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara					12	24.000.000
X	XX	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	250.000.000,00			4	1.190.200.000
X	XX	1	02.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara					0	-
X	XX	1	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara					2	385.000.000
X	XX	1	02.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara					2	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara					4	82.500.000
X	XX	1	02.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	100 orang	250.000.000,00			119	392.700.000
X	XX	1	02.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara					119	275.000.000
X	XX	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	1.048.384.197,00			4	1.680.000.000
X	XX	1	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara					1	55.000.000,00
X	XX	1	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	200.000.000,00			1	360.000.000,00
X	XX	1	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	300.000.000,00			1	350.000.000,00
X	XX	1	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	200.000.000,00			2	300.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	17.500.000,00			12	30.000.000,00
X	XX	1	02.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara					4	82.500.000,00
X	XX	1	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	300.000.000,00			12	420.000.000,00
X	XX	1	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	30.884.197,00			12	82.500.000,00
X	XX	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara					4	862.592.680
X	XX	1	02.07	0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara					0	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.07	0005	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara					30	500.000.000,00
X	XX	1	02.07	0006	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara					10	362.592.680,00
X	XX	1	02.07	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara						
X	XX	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	1.703.477.106,00			4	1.984.148.195

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	296.766.216,00			12	326.766.216
X	XX	1	02.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	40.000.000,00			12	44.000.000
X	XX	1	02.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	1.366.710.890,00			12	1.613.381.979
X	XX	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	899.710.000,00			4	684.510.000
X	XX	1	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	69.320.000,00			1	69.320.000
X	XX	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara	22 Unit	496.390.000,00			22	496.390.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	149 Unit	90.000.000,00			149	118.800.000
X	XX	1	02.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	244.000.000,00			0	0
X	XX	1	02.13		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana	Kab. Kutai Kartanegara					1	110.000.000
X	XX	1	02.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara					1	110.000.000
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	Kab. Kutai Kartanegara	12,07 Triliun Rupiah	1.275.000.000,00			12,43	1.705.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Realisasi Total terhadap Target Investasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,98 Persen				77,67	
2	18	2	2.01		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan.</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Draf peraturan</i>	<i>375.000.000,00</i>			1	<i>1.540.000.000</i>
2	18	2	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	2 peraturan	150.000.000,00			4	540.000.000
2	18	2	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Kesepakatan	225.000.000,00			2	1.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	900.000.000,00			4	165.000.000
2	18	2	2.02	0003	Pemutakhiran Data Potensi Invetasi pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran Data Potensi Invstasi	Kab. Kutai Kartanegara	20 Daerah	75.000.000,00			5	165.000.000
2	18	2	2.02	0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Naskah	75.000.000,00				
2	18	2	2.02	0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	750.000.000,00				
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Kab. Kutai Kartanegara	83 persen	460.269.000,00			85	1.560.000.000
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)	Kab. Kutai Kartanegara	5 Loi	460.269.000,00			5	1.560.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	3	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	340.269.000,00			4	1.250.000.000
2	18	3	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	120.000.000,00			2	310.000.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Kab. Kutai Kartanegara	79 Persen	719.000.000,00			80	900.000.000
2	18	5	2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>719.000.000,00</i>			<i>4</i>	<i>900.000.000</i>
2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kutai Kartanegara	210 Pelaku Usaha	345.000.000,00			450	540.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	33 Kegiatan Usaha	274.000.000,00			34	360.000.000
2	18	5	2.01	0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	15 Kegiatan Usaha	100.000.000,00				
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	930.000.000,00			100	1.535.000.000
2	18	4	2.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>2546 Ijin</i>	<i>930.000.000,00</i>			<i>2597</i>	<i>1.535.000.000</i>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara					1	300.000.000,00
2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1126 Pelaku Usaha	400.000.000,00			1170	480.000.000,00
2	18	4	2.01	0007	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bag Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	332 Kegiatan Usaha	250.000.000,00			339	450.000.000,00
2	18	4	2.01	0008	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1589 Pelaku Usaha	280.000.000,00			1640	305.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	625.000.000,00			100	1.399.903.920
2	18	6	2.01		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>625.000.000,00</i>			<i>12</i>	<i>1.399.903.920</i>
2	18	6	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	625.000.000,00			12	1.399.903.920,00

4.2 Kontribusi terhadap program prioritas daerah, target nasional, SPM dan tematik

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 serta mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai arah kebijakan pemerintah.

Dalam mendukung Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara, DPMPTSP berperan pada Program Dedikasi Pelayanan Publik Cerdas melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach* / OSS-RBA). Dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta didukung oleh pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan publik sekaligus mendukung transformasi digital pemerintahan.

Selain itu, DPMPTSP juga mendukung Program Dedikasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan peta potensi dan peluang investasi, pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal, penguatan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM, serta penyelenggaraan promosi investasi daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperluas investasi pada sektor-sektor ekonomi unggulan, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di tingkat nasional, rencana kerja DPMPTSP Tahun 2027 juga mendukung Prioritas Nasional berupa "Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri." Dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, khususnya pada

kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal serta Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi, memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan investasi sehingga realisasi investasi dapat berjalan lebih efektif, memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, serta mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam sesuai arah kebijakan pembangunan nasional.

Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang kuat dengan sasaran pembangunan daerah maupun nasional. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan disusun tidak hanya untuk mencapai target kinerja perangkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi daerah, transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai bentuk keterkaitan antara program perangkat daerah dengan program prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional, rincian kontribusi masing-masing program disajikan pada Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Nasional.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional

No	Program Prioritas DPMPTSP	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterkaitan dengan Program Prioritas
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal dengan sub kegiatan : 1. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan : 1. Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara: <i>Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera</i> melalui peningkatan iklim investasi, penyediaan informasi potensi investasi, pemberian insentif, dan penguatan kemitraan investasi.
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan sub kegiatan :	Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara: <i>Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera</i> melalui promosi peluang investasi

No	Program Prioritas DPMPTSP	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterkaitan dengan Program Prioritas
			1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	untuk menarik investor pada sektor-sektor unggulan daerah.
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dengan sub kegiatan : 1. Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha 3. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara: <i>Pelayanan Publik Cerdas</i> melalui digitalisasi pelayanan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi OSS-RBA.

No	Program Prioritas DPMPTSP	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterkaitan dengan Program Prioritas
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi dengan sub kegiatan: 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik	Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara: <i>Pelayanan Publik Cerdas</i> melalui penguatan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan berbasis digital.
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kualitas realisasi investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan : 1. Pengawasan Penanaman Modal. 2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam	Prioritas Nasional: <i>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</i> melalui pengawasan realisasi investasi, penyelesaian hambatan investasi, dan percepatan investasi yang mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

No	Program Prioritas DPMPTSP	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterkaitan dengan Program Prioritas
			Merealisasikan Kegiatan Usahanya.	

Sumberdata : Renstra DPMPTSP 2025-2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan beserta kebutuhan pendanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027 yang diuraikan pada Bab IV.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penetapan target kinerja tersebut bertujuan untuk memastikan kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan daerah sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Tahun 2027.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa meskipun realisasi keuangan perangkat daerah masih relatif rendah akibat kebijakan efisiensi anggaran, sebagian besar indikator output program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan sesuai target yang direncanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perangkat daerah tidak hanya diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan ketercapaian indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) yang mendukung sasaran pembangunan daerah.

Dalam penyusunan target Tahun 2027, DPMPTSP tetap mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 yang menempatkan peningkatan investasi daerah, penguatan investasi sektor non-ekstraktif, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, serta penguatan tata kelola data investasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, target indikator kinerja Tahun 2027 ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan capaian Triwulan II Tahun 2026, proyeksi pelaksanaan program sampai akhir tahun, serta kemampuan pendanaan daerah.

5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Target IKU Tahun 2027 disusun berdasarkan target

Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab II, indikator pertumbuhan investasi, khususnya investasi sektor non-ekstraktif, masih dipengaruhi oleh dinamika realisasi investasi, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, serta proses pelaporan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, pembinaan pelaku usaha, penguatan promosi investasi, dan peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM menjadi strategi utama dalam mendukung pencapaian target IKU Tahun 2027.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2027
Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	1,00
	Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)	2,70
	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)	4,10

Sumber data : Renstra DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara, 2025-2029

Target IKU tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 sebagaimana telah ditetapkan pada Bab III. Dimana target IKU Tahun 2027 menunjukkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan realisasi investasi, khususnya pada sektor ekonomi non-ekstraktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Penetapan target tersebut disusun secara realistis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Dengan demikian, indikator kinerja utama tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan publik pada Tahun 2027.

5.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sesuai kewenangan pemerintah daerah. Penetapan target IKK Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan target nasional, target RPJMD, target Renstra DPMPTSP, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Pencapaian indikator kinerja kunci diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui optimalisasi implementasi OSS-RBA, meningkatkan kepastian hukum bagi investor, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta meningkatkan kualitas data investasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu oleh pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas indikator kinerja bidang penanaman modal. Oleh karena itu, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha akan terus ditingkatkan agar data investasi yang dihasilkan lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Penanaman Modal Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kutai Kartanegara	Persentase	-29,18	0	0,8	1,0	1,10	1,15	1,20	
2		Persentase	70	72,63	69,41	68,97	69,06	69,46	70,47	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Realisasi Total terhadap Target Investasi									

Sumber data : Renstra DPMPSTSP Kab. Kutai Kartanegara, 2025-2029

Target IKK tersebut mendukung pencapaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan pada Bab III serta direncanakan pendanaannya pada Bab IV.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal sesuai kewenangan pemerintah daerah. Seluruh indikator tersebut mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sekaligus menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target Renstra DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025–2029 dan diselaraskan dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Renja DPMPTSP Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai instrumen perencanaan pada tahun akselerasi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan penanaman modal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada pemulihan dan peningkatan kualitas investasi, penguatan sektor ekonomi non-ekstraktif, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan usaha yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2027 telah disusun secara sistematis dan terintegrasi, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu strategis penyelenggaraan urusan penanaman modal, serta kapasitas kelembagaan dan fiskal daerah. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja dan hasil.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2027 sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu, sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi dunia usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Renja ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun Anggaran 2027, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Renja harus dilakukan secara adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi daerah, transformasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

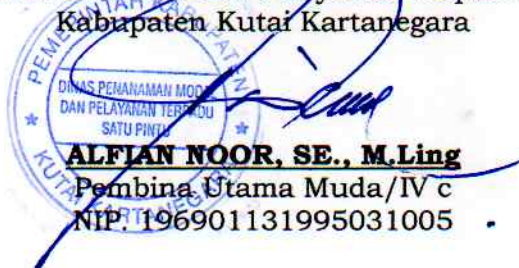
Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan penanaman modal secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Renja DPMPTSP Tahun 2027 juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat disesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Tenggarong, 27 Juli 2026

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara



ALFIAN NOOR, SE., M.Ling
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 196901131995031005



KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
JALAN : WOLTER MONGINSIDI TENGGARONG
KODE POS 75511